



RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat tersusun. Renja ini disusun untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya disertai dengan indicator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk tahun 2023.

Demikian perubahan Renja ini disusun, kami menyadari Renja Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang dapat menunjang terhadap perbaikan Renja ini sangat kami harapkan.

Singaparna, Juli 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



DADANG TABRONI, SH., MH
NIP. 19670503 199803 1 011

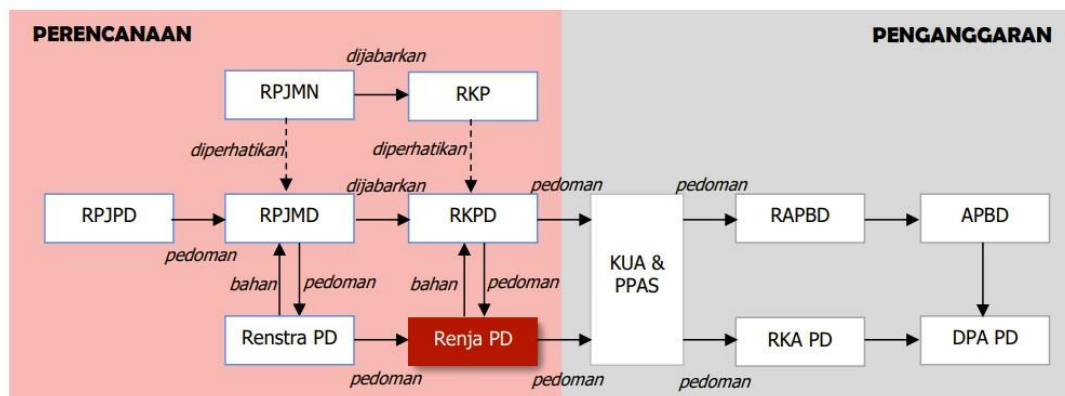
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2021	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP	35
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP.....	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP.....	55
BAB IV PENUTUP	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah berupa dokumen rencana strategis (Renstra) maupun jangka pendek berupa dokumen rencana kerja (Renja). Selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya disebutkan bahwa Renstra dirumuskan kedalam rancangan Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam menjalankan amanat tersebut, Satpol PP sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, dengan berdasar pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023. Penyusunan renja dilakukan dengan memperhatikan target kinerja pada Renstra Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026.

Renja ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja adalah:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja adalah memberikan arahan dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada anggaran Satpol PP Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP secara kesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023;
- 2) Mewujudkan perencanaan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- 3) Menjadi tolak ukur kinerja dalam menilai implementasi program dan kegiatan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penulisan Perubahan Renja adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Satpol PP, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN 2021

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Satpol PP yang berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2021 dan capaian Renstra Satpol PP, analisis kinerja pelayanan Satpol PP, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 serta penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

Bab ini menjelaskan telaahan yang telah dilakukan terhadap kebijakan nasional dan provinsi serta menjelaskan tujuan dan sasaran Renja Satpol PP untuk Tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

Bab ini menjelaskan rencana kerja dan pendanaan program serta kegiatan tahun anggaran 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2021 dan Capaian Renstra Satpol PP Tahun 2021

Kualitas renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan, yaitu memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang nantinya akan menunjang terhadap pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan. Dalam penyusunan renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan renja yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan renja dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan juga disajikan perkiraan tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan perkiraan capaian Renstra Tahun 2021 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2021

Pelaksanaan Renja Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Satpol PP Tahun 2021 merencanakan 12 program dan 46 kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2021 dilaksanakan

sebanyak 3 program dan 12 kegiatan dengan 27 sub kegiatan, dengan di dukung oleh anggaran belanja daerah sebesar Rp. 8.515.279.699,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan, yang diantaranya:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 64.400.000 telah terserap dana sebesar Rp. 63.348.150,- atau 98,37%. Output: tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 (empat) dokumen berupa dokumen Renstra Tahun 2021-2025, Perubahan Renja Tahun 2021, Renja Tahun 2022, Rancangan Awal Renja tahun 2023. Outcome: dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas.

(2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 telah terserap dana sebesar Rp. 19.728.950,- atau 98,64%. Output: tersedianya dokumen hasil evaluasi kinerja Satpol PP sebanyak 7 (tujuh) dokumen yang diantaranya dokumen Cascading, IKU Satpol PP, Evaluasi Rencana Aksi, Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja, Perjanjian Kinerja Eselon II, Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Satpol PP. Outcome: dokumen evaluasi yang berkualitas.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.027.652.499,- telah terserap dana sebesar Rp. 4.818.984.668,- atau 95,85%. Output: terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun. Outcome: meningkatnya kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp. 181.929.800,- telah terserap dana sebesar Rp. 181.929.800,- atau 100%. Output: tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Outcome: meningkatnya performa kedisiplinan anggota dalam berpakaian.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 25.051.800,- telah terserap dana sebesar Rp. 24.221.200,- atau 96,68%. Output: tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome: terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 91.288.100,- telah terserap dana sebesar Rp. 90.703.100,- atau 99,36%. Output: tersedianya bahan logistik kantor. Outcome: terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama 1 (satu) tahun.

- (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 15.155.800,- telah terserap dana sebesar Rp. 15.155.800,- atau 100%. Output: tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 (satu) tahun. Outcome: meningkatnya daya dukung administrasi pelayanan kantor.
 - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.024.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 4.395.000,- atau 72,96%. Output: tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan selama 1 (satu) tahun. Outcome: bertambahnya pengetahuan dan wawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%. Output: tersedianya kebutuhan makanan dan minuman tamu, dengan Outcome terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu selama 1 (satu) tahun.
 - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 77.000.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 76.295.000,- atau 99,08%. Output: terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Outcome: bertambahnya informasi (pengetahuan dan pemahaman) hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 (satu) tahun.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 35.885.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 35.885.000,- atau 100%. Output: tersedianya peralatan dan mesin lainnya berupa 2 (dua) unit Laptop. Outcome: meningkatnya sarana penunjang pelayanan kantor melalui pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
- (1) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 57.000.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 46.650.441,- atau 81,84%. Output: terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet pada Satuan Polisi Pamong Praja. Outcome: terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet sebagai penunjang pelayanan selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.662.400.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 1.662.400.000,- atau 100%. Output: tersedia dan terbayarnya jasa pelayanan umum kantor. Outcome: meningkatnya kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selama 1 (satu) tahun.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar

Rp. 144.995.500,- telah terserap dana sebesar Rp. 129.605.111,- atau 89,39%. Output: terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Outcome: bertambahnya masa manfaat kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama 1 (satu) tahun.

(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 194.993.550,- telah terserap dana sebesar Rp. 189.447.050,- atau 97,16%. Output: terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan. Outcome: bertambahnya masa manfaat kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 1 (satu) tahun.

(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 5.030.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 5.030.000,- atau 100%. Output: terpeliharanya peralatan dan mesin berupa 2 (dua) unit peralatan computer lainnya dan 5 (lima) unit personal computer. Outcome: bertambahnya masa manfaat peralatan dan mesin lainnya.

(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 28.456.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 23.432.850,- atau 82,35%. Output: terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya. Outcome atau hasilnya adalah bertambahnya masa manfaat gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yang diantaranya :

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 77.101.850,- telah terserap dana sebesar Rp. 77.101.850,- atau 100%. Output: terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Outcome: terkendalinya situasi dan kondisi dari kemungkinan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
 - (2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan anggaran sebesar Rp. 31.720.750,- telah terserap dana sebesar Rp. 31.720.750,- atau 100%. Output: terlaksananya penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada. Outcome: timbulnya kepatuhan masyarakat di daerah yang terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkada.
 - (3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, dengan anggaran sebesar Rp. 112.453.200,- telah terserap dana sebesar Rp. 112.453.200,- atau

100%. Output: Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang berkapasitas dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia. Outcome: meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

(4) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran sebesar Rp. 412.000.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 411.191.000,- atau 99,80%. Output: terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dengan Outcome terjalannya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota terdiri dari 2 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

(1) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan anggaran sebesar Rp. 29.038.650,- telah terserap dana sebesar Rp. 29.038.650,- atau 100%. Output: terlaksananya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Outcome: terwujudnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan anggaran sebesar Rp. 29.225.400,- telah terserap dana sebesar Rp. 29.225.400,- atau 100%. Output: terlaksananya penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Outcome: tertanganinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yang diantaranya :
- 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
- (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan anggaran sebesar Rp. 56.399.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 56.399.000,- atau 100%. Output: tersedianya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri. Outcome: terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan pelindung diri.
- (2) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebelum perubahan adalah Rp. 34.400.00,- namun dikarenakan adanya refocusing untuk percepatan penanganan virus covid-19 maka terjadi perubahan anggaran Rp. 0,- sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

- 2) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran terdiri dari 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%. Output: terlaksananya pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran, dengan Outcome terdatanya jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran di Kabupaten Tasikmalaya.
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran terdiri dari 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 90.078.800,- telah terserap dana sebesar Rp. 90.078.800,- atau 100%. Output: jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Outcome: meningkatnya pemahaman dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Perkiraan Capaian Tahun 2022

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Satpol PP mendapatkane lokasi belanja sebesar Rp 13.046.120.217 untuk melaksanakan 2 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan

kegiatan Renja berdasarkan DPPA Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan, yang diantaranya:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 41.237.600,- (51,55%) dari total anggaran Rp. 80.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 68,75% dengan output yaitu jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 8 dokumen.

(2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 12.807.750,- (64,04%) dari total anggaran Rp. 20.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 78,57% dengan output yaitu jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 7 dokumen.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 1.919.544.350,- (45,00%) dari total anggaran Rp. 4.265.490.367,- dengan realisasi fisik kegiatan 50,00% dengan output yaitu persentase ASN Satpol PP yang menerima gaji dan tunjangan dengan target 100%.

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 57.318.250,- (42,13%) dari total anggaran Rp. 136.045.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 80,00% dengan output yaitu jumlah pakaian dinas khusus olahraga Satpol PP beserta atribut kelengkapannya sebanyak 124 stel.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
- (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 11.401.800,- (44,12%) dari total anggaran Rp. 25.841.400,- dengan realisasi fisik kegiatan 50,00% dengan output yaitu jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.
 - (2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 72.322.400,- (66,62%) dari total anggaran Rp. 108.563.100,- dengan realisasi fisik kegiatan 50,00% dengan output yaitu jumlah ketersediaan bahan logistic kantor selama 12 bulan.
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan

Bulan Juni Rp. 15.278.600,- (49,19%) dari total anggaran Rp. 31.059.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 50,00% dengan output yaitu jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan.

(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 1.500.000,- (24,90%) dari total anggaran Rp.6.024.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 70,42% dengan output yaitu jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan selama 12 bulan.

(5) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini ampai dengan Bulan Juni Rp. 5.000.000,- (12,50%) dari total anggaran Rp. 40.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 20,00% dengan output yaitu jumlah ketersediaan fasilitasi kunjungan tamu berupa makanan dan minuman sebanyak 800 box.

(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 42.595.000,- (21,30%) dari total anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 47,50% dengan output yaitu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Pengadaan Mebel dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 57.560.300,- (95,60%) dari total anggaran Rp. 60.210.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 100,00%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.649.700,- dengan output yaitu jumlah pengadaan barang mebel sebanyak 3 jenis.
 - (2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 153.334.500,- (90,30%) dari total anggaran Rp.169.800.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 100,00%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.465.500,- dengan output yaitu jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 5 jenis.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
- (1) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 18.430.508,- (24,57%) dari total anggaran Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 50,00% dengan output yaitu jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Satuan Polisi Pamong Praja selama 12 bulan.
 - (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan

Bulan Juni Rp. 1.047.200.000,- (50,13%) dari total anggaran Rp. 2.088.800.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 50,00% dengan output yaitu jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 76 orang.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 79.776.900,- (42,89%) dari total anggaran Rp. 185.995.500,- dengan realisasi fisik kegiatan 42,86% dengan output yaitu jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terbayar pajaknya sebanyak 21 unit serta terpelihara sebanyak 23 unit.

(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 68.703.300,- (37,47%) dari total anggaran Rp. 186.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 50,00% dengan output yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayar pajak serta terpelihara sebanyak 8 unit serta terpenuhi perizinannya sebanyak 5 unit.

- (3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 1.500.000,- (29,82%) dari total anggaran Rp.5.030.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 33,33% dengan output yaitu jumlah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 12 bulan.
 - (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 0,- (00,00%) dari total anggaran Rp.28.223.300,- dengan realisasi fisik kegiatan 00,00% dengan output yaitu jasa pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yang diantaranya:
- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 36.428.750,- (45,54%) dari total anggaran Rp. 80.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 55,81% dengan output yaitu jumlah pelaksanaan pencegahan

gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama 12 bulan.

- (2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 21.740.000,- (43,48%) dari total anggaran Rp. 50.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 55,13% dengan output yaitu jumlah pelaksanaan penindakan atas pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kabupaten / Kota selama 12 bulan.
- (3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 2.677.500,- (7,65%) dari total anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 0% dengan output yaitu jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten sebanyak 4 kali.
- (4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 94.285.750,- (2,56%) dari total anggaran Rp. 3.687.520.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 33,33% dengan output yaitu jumlah anggota Satlinmas yang

diberi kartu anggota sebanyak 1.000 orang, jumlah anggota Satlinmas yang diberi santunan kematian sebanyak 75 orang serta jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 7.931 orang.

- (5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 59.443.550,- (83,74%) dari total anggaran Rp. 70.983.550,- dengan realisasi fisik kegiatan 100,00%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.540.000,- dengan output yaitu jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pengembangan kapasitas sebanyak 28 orang.
- (6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 558.566.328,- (48,58%) dari total anggaran Rp. 1.149.700.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 00,00%. Realisasi fisik 00,00% dikarenakan yang menjadi target adalah 1 Dokumen akhir dari pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dengan output yaitu persentase pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik

pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 100 %.

(7) Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 0,-(0%) dari total anggaran Rp. 23.750.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 00,00%. Realisasi fisik 00,00% dikarenakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu penegakan Perda dan Perkada tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun materiil dengan output yaitu jumlah penyediaan ganti rugi dan biaya pengobatan sebagai dampak penegakan Perda dan Perkada selama 12 bulan.

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota terdiri dari 3 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

(1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 45.940.000,- (10,21%) dari total anggaran Rp. 450.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 50,00% dengan output yaitu jumlah peserta sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 400 orang.

(2) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 14.849.550,- (29,70%) dari total

anggaran Rp. 50.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 33,33% dengan output yaitu jumlah pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati selama 12 bulan.

(3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 7.537.000,- (1,81%) dari total anggaran Rp. 416.195.252,- dengan realisasi fisik kegiatan 8,00% dengan output yaitu jumlah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati selama 12 bulan.

3) Kegiatan Pembinaan Peyidik Pegawai Negeri Sipil dan Karier PPNS terdiri dari 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Bulan Juni Rp. 36.935.000,- (99,60%) dari total anggaran Rp. 37.085.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 150.000,- dengan output yaitu jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karier sebanyak 16 orang.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8= (7/6)		9=(5+7)		10=(9/4)	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	16.565.663.921	77,20	7.676.938.800	15,08	691.539.850	15,08	690.730.850	100	99,88	92,28	8.367.669.650	92,28	50,51
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	9.623.646.000	71,07	6.591.215.400	13,49	633.275.800	13,49	632.466.800	100	99,87	84,56	7.223.682.200	84,56	75,06
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	72	6.225.506.000	60	4.447.445.650	12	77.101.850	12	77.101.850	100	100	72	4.524.547.500	100	72,68
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Bulan	72	875.000.000	60	409.831.000	12	31.720.750	12	31.720.750	100	100	72	441.551.750	100	50,46

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8=(7/6)		9=(5+7)		10=(9/4)			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Berkapasitas dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1949	2.523.140.000	907	1.733.938.750	77	112.453.200	77	112.453.200	100	100	984	1.846.391.950	50,49	73,18
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Bulan	3		-	-	3	412.000.000	3	411.191.000	100	99,80	3	411.191.000	16,67	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			100	6.942.017.921	83,33	1.085.723.400	16,67	58.264.050	16,67	58.264.050	100	100	100	1.143.987.450	100	16,48
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Bulan	72	733.417.921	60	462.781.600	12	29.038.650	12	29.038.650	100	100	72	491.820.250	100	67,06

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9=(5+7)		10=(9/4)	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Bulan	72	6.208.600.000	60,0	622.941.800	12	29.225.400	12	29.225.400	100	100	72	652.167.200	100	10,50
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			100	11.920.400.000	44,50	3.402.423.818	30,66	171.477.800	30,66	171.477.800	100	100	75,16	3.573.901.618	75,16	29,98
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	11.425.400.000	21,32	3.253.798.268	25,00	56.399.000	25,00	56.399.000	100	100	46,32	3.310.197.268	46,32	28,97
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jenis	12	11.025.400.000	3	3.193.838.268	6	56.399.000	6	56.399.000	100	100	9	3.250.237.268	75,00	29,48
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	17	400.000.000	3	59.960.000	0	-	0	-	0	0	3	59.960.000	17,65	14,99
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			100	250.000.000	75,00	48.960.000	12,50	25.000.000	12,50	25.000.000	100	100	87,50	73.960.000	87,50	29,58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9=(5+7)		10=(9/4)	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bulan	48	250.000.000	36	48.960.000	6	25.000.000	6	25.000.000	100	100	42	73.960.000	87,50	29,58
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			100	245.000.000	37,18	99.665.550	54,49	90.078.800	54,49	90.078.800	100	100	91,67	189.744.350	91,67	77,45
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	312	245.000.000	116	99.665.550	170	90.078.800	170	90.078.800	100	100	286	189.744.350	91,67	77,45
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100	45.413.634.498	63,08	33.628.128.380	18,22	7.652.262.049	14,58	7.402.212.120	80,02	96,73	77,66	41.028.340.500	77,66	90,34
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	341.000.000	58,82	233.471.400	32,35	84.400.000	32,35	83.077.100	100	98,43	91,18	316.548.500	91,18	92,83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	211.000.000	10	126.250.150	4	64.400.000	4	63.348.150	100	98,37	14	189.598.300	82,35	89,86
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Satpol PP	Dokumen	17	130.000.000	10	107.221.250	7	20.000.000	7	19.728.950	100	98,64	17	126.950.200	100	97,65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9=(5+7)		10=(9/4)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	28.383.645.198,32	83,33	22.528.589.869	16,67	5.027.652.499	16,67	4.818.984.668	100	95,85	100	27.347.574.537	100	96,35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	72	28.383.645.198,32	60	22.528.589.869	12	5.027.652.499	12	4.818.984.668	100	95,85	72	27.347.574.537	100	96,35
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	846.800.000	18,62	150.460.600	20,86	181.929.800	20,86	181.929.800	100	100	39,48	332.390.400	39,48	39,25
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	580	846.800.000	108	150.460.600	121	181.929.800	121	181.929.800	100	100	229	332.390.400	39,48	39,25
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	2.698.187.700	83,33	1.798.889.050	16,67	229.519.700	16,67	225.770.100	100	98,37	100	2.024.659.150	100	75,04
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	72	218.114.950	60	126.414.850	12	25.051.800	12	24.221.200	100	96,68	72	150.636.050	100	69,06
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	72	615.617.750	60	453.090.850	12	91.288.100	12	90.703.100	100	99,36	72	543.793.950	100	88,33
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	72	260.419.000	60	166.516.050	12	15.155.800	12	15.155.800	100	100	72	181.671.850	100	69,76
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	72	31.300.000	60	19.915.000	12	6.024.000	12	4.395.000	100	72,96	72	24.310.000	100	77,67
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	Bulan	72	60.500.000	60	21.400.000	12	15.000.000	12	15.000.000	100	100	72	36.400.000	100	60,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8=(7/6)		9=(5+7)		10=(9/4)			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	72	1.512.236.000	60	1.011.552.300	12	77.000.000	12	76.295.000	100	99,08	72	1.087.847.300	100	71,94
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	1.202.950.000	30,77	361.944.775	7,69	35.885.000	7,69	35.885.000	100	100	38,46	397.829.775	38,46	33,07
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	13	1.202.950.000	4	361.944.775	1	35.885.000	1	35.885.000	100	100	5	397.829.775	38,46	33,07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	8.249.920.000	83,33	6.043.759.429	16,67	1.719.400.000	16,67	1.709.050.441	100	99,40	100	7.752.809.870	100	93,97
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet pada Satuan Polisi Pamong Praja	Bulan	72	328.900.000	60	182.321.229	12	57.000.000	12	46.650.441	100	81,84	72	228.971.670	100	69,62
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia dan Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	72	7.921.020.000	60	5.861.438.200	12	1.662.400.000	12	1.662.400.000	100	100	72	7.523.838.200	100	94,99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	3.691.131.600	83,33	2.509.013.257	16,67	373.475.050	16,67	347.515.011	100	93,05	100	2.856.528.268	100	77,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	72	1.270.025.500	60	885.389.005	12	144.995.500	12	129.605.111	100	89,39	72	1.014.994.116	100	79,92

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9=(5+7)		10=(9/4)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	72	1.849.650.100	60	1.474.434.175	12	194.993.550	12	189.447.050	100	97,16	72,00	1.663.881.225	100	89,96
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Bulan	72	196.000.000	60	12.500.000	12	5.030.000	12	5.030.000	100	100	72,0	17.530.000	100	8,94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	72	375.456.000	60	136.690.077	12	28.456.000	12	23.432.850	100	82,35	72	160.122.927	100	42,65

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Penyelenggaraan pelayanan Satpol PP adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melakukan analisis kinerja pelayanan Satpol PP mengacu pada indikator – indikator yang tercantum pada Renstra Satpol PP Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP
Tahun 2021 dan Proyeksi Capaian Tahun 2022

Indikator	Standar Nasional / Provinsi	IKK	Target					Realisasi	Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	IKU Eselon II	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	-	IKU Eselon II	N/A	52	55	57,5	60	N/A	-

Adapun hasil analisis dari pencapaian target sasaran Satpol PP Tahun 2021 sampai dengan triwulan II tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Indikator “persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum” dengan target 100 % dan pada tahun 2021 terealisasi 100 % dikarenakan tidak terdapat laporan ataupun hasil pendataan mengenai jumlah dan identitas warga negara yang terdampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan

Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.

- b. Indikator “nilai reformasi birokrasi perangkat daerah” dengan target N/A dikarenakan masih dalam proses penyusunan dan belum dilakukan penilaian sehingga belum dapat menyajikan proyeksi realisasi.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP tidak terlepas dari isu – isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi maupun isu – isu yang berasal dari permasalahan eksternal. Dari hasil analisis pelayanan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Satpol PP terhadap target yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja 2022 maupun Renstra 2021 – 2026 sampai dengan triwulan II sudah *on the track*. Terdapat indikator yang telah mencapai target dan terdapat pula indikator yang masih dalam proses pencapaian target.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga menyebabkan suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka

panjang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain:

Tabel 2.3
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Beragamnya pelanggaran Perda dan Perkada yang berpotensi menyebabkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Adanya pusat keramaian dan memunculkan kerawanan social	Perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas pembangunan
	Kuranginya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam implementasi Perda dan Perkada	Kuranginya sosialisasi Perda dan Perkada
	Belum memadainya daya dukung internal Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan ideal	Kuranginya sumber daya manusia Kurang memadainya sarana prasarana pendukung pelayanan

Penjelasan dari akar permasalahan tabel diatas adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas pembangunan, yang dapat melahirkan pusat keramaian dan memunculkan kerawanan sosial yang berujung pada timbul dan beragamnya pelanggaran Perda dan Perkada serta pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang menyebabkan belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP.
- b. Masih kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat, yang menimbulkan masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam implementasi

Perda dan Perkada dan berpengaruh juga terhadap bertambahnya pelanggaran.

- c. Adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga-lembaga pemerintah dan sering menimbulkan gesekan atau sikap saling membiarkan yang berujung pada belum maksimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya beberapa fungsi antara institusi Polri dan Satpol PP, meskipun diatur dengan undang-undang yang berbeda tetapi masih melaksanakan orientasi fungsi yang hampir sama terutama mengenai ketertiban sehingga dapat menyebabkan konflik. Tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan perbedaan keputusan pengelolaan dan penyelenggaraan ketertiban masyarakat di lapangan.
- d. Belum memadainya daya dukung internal Satpol PP sesuai dengan kebutuhan ideal dalam melaksanakan tugas-tugas potensial berkenaan dengan tindakan preemtif maupun preventif dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada. Baik dari segi sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas maupun sarana prasarana pendukung pelayanan sehingga membuat kinerja Satpol PP kurang efektif dalam menciptakan suasana tertib dan tenteram.

Dari permasalahan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan nantinya dapat juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dengan adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat diformulasikan isu – isu yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada Satpol PP yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah, Dengan pertumbuhan pembangunan berdampak peningkatan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada daerah ini intensitas aktivitas interaksi sosial masyarakat pun semakin tinggi, sementara itu daerah lainnya semakin tertinggal. Perilaku demikian membawa daerah pembangunan infrastruktur tinggi pada peningkatan kerawanan sosial yang berujung pada gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
2. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan, perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat, dimana melahirkan kondisi sosial baru dan perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat, Situasi tersebut apabila tidak diikuti dengan regulasi yang sesuai maka berpotensi menimbulkan ketidak tertiban dalam interaksi sosial masyarakat.
3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Demi memenuhi kebutuhan hidup sering kali masyarakat mengabaikan aturan hukum yang ada baik hukum nasional maupun hukum daerah. Perilaku tidak tertib ini sering mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan banyak orang dan juga meniadakan dampak negatif jangka panjang. Hal ini terjadi di hampir semua sektor kehidupan sosial masyarakat.
4. Penataan kawasan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya yang masih belum adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah pemukiman terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula dan akhirnya

akan berdampak pada pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.

5. Penanggulangan covid-19 tahun 2022 dengan adanya peningkatan kembali kasus covid-19 di Indonesia Peran Satpol PP dalam Penanggulangan Pandemi berperan dari hulu ke hilir. Penanganan dari hulu adalah penanganan dalam rangka pencegahan penularan covid-19 dengan mencegah terjadinya kerumunan, mengurangi mobilitas masyarakat. Sedangkan penanganan di hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan bila ditugaskan untuk melacak orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif covid-19 dan meminta masyarakat untuk melakukan isolasi secara mandiri.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Terkait penyusunan Perubahan Renja dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Satpol PP, sebagai mana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
					50.696.669.556					49.521.430.356
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.512.978.925	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75 Point	16.332.778.925
								Nilai IKM Perangkat Daerah	86,21	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				128.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	128.800.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	69.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	69.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	34.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya,	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4 Laporan	25.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya,	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4 Laporan	25.300.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Singaparna, Sukaasih	Perangkat Daerah				Singaparna, Sukaasih	Perangkat Daerah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.389.628.925	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai	100 %	8.389.628.925
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	686 orang / bulan	8.389.628.925	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	686 orang / bulan	8.389.628.925
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				575.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	575.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	7 paket	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	7 paket	500.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	125 Orang	75.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	125 Orang	75.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				575.150.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum		645.150.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	50.150.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	70.150.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	160.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	160.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	65.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	497 dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	497 dokumen	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48 laporan	75.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48 laporan	75.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Kabupaten / Kota, Seluruh Kecamatan, Seluruh Desa / Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98 laporan	215.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Kabupaten / Kota, Seluruh Kecamatan, Seluruh Desa / Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98 laporan	215.000.000
						Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	50.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.100.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Tasikmalaya, Singaparna,	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	3 unit	900.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Tasikmalaya, Singaparna,	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	3 unit	900.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Jabatan	Sukaasih	disediakan			Jabatan	Sukaasih	disediakan		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	1.800.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	1.800.000.000
	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket barang mebel yang disediakan	105 unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah paket barang mebel yang disediakan	105 unit	200.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	200.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.689.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.439.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	98.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	98.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	3.591.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.340.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.055.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		1.055.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 unit	350.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	550.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	550.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah mebel yang dipelihara	7 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah mebel yang dipelihara	7 unit	15.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	15.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	125.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				33.183.690.631	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Tindak Lanjut Gangguan Trantibum serta Pelanggaran Perda dan Perkada		33.188.651.431
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31.397.540.631	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		31.402.501.431

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten		
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	80 kasus	14.700.795.250	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	80 kasus	14.700.795.250
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	60 kasus	280.108.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	60 kasus	280.108.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	4 dokumen	48.300.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	4 dokumen	48.300.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	4 dokumen	11.815.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	4 dokumen	11.819.960.800
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1377 orang	1.940.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1377 orang	1.940.000.000
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seluruh Kabupaetn / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan	1 dokumen	1.625.817.500	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seluruh Kabupaetn / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan	1 dokumen	1.625.817.500
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	2 unit	420.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	2 unit	420.000.000
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 Dokumen	200.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	4 laporan	367.519.881	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	4 laporan	367.519.881
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.681.900.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		1.681.900.000
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda / Perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	1 laporan	625.500.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda / Perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	1 laporan	625.500.000
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Tasikmalaya, Seluruh kecamatan, seluruh kelurahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	24 laporan	500.400.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Tasikmalaya, Seluruh kecamatan, seluruh kelurahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	24 laporan	500.400.000
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Tasikmalaya, Seluruh kecamatan, seluruh kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota yang dapat ditangani sesuai SOP	12 laporan	556.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Tasikmalaya, Seluruh kecamatan, seluruh kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota yang dapat ditangani sesuai SOP	12 laporan	556.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				104.250.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Rasio PPNS terhadap kasus yang ditangani		104.250.000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkara	1 laporan	104.250.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkara	1 laporan	104.250.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan musrenbang kecamatan. Namun untuk tahun 2023 tidak terdapat usulan yang diperoleh.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sasaran Pembangunan Tahun 2023 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indicator
 - a. Pertumbuhan ekonomi;
 - b. Tingkat pengangguran terbuka;
 - c. Rasio gini; dan
 - d. Penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indicator
 - a. Indeks pembangunan manusia; dan
 - b. Tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 adalah

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibukota Nusantara.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan, yakni:

1. Penguatan sistem jaminan sosial;
2. Percepatan modernisasi pertanian;
3. Peningkatan pemerataan pembangunan;
4. Penguatan system kesehatan nasional;
5. Peningkatan kualitas pendidikan (system pendidikan dan pendidikan karakter);
6. Perluasan penyediaan lapangan usaha;
7. Percepatan revitalisasi pariwisata;
8. Memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional;
9. Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri;
10. Penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan;
11. Mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon;
12. Percepatan transisi energi;
13. Peningkatan penyediaan alat bersih sanitasi;
14. Percepatan pemerataan infrastruktur digital;
15. Percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas; dan
16. Percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta untuk mempermudah dalam penentuan strategi serta arah kebijakan maka perlu ditentukan tujuan dan sasaran jangka menengah di Satpol PP. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Satpol PP tidak secara langsung tersurat dalam mendukung tujuan, sasaran maupun indikatornya, tetapi tersirat dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka penunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berikut tabel tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan Satpol PP :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD yang Berkaitan dengan Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional				
T2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan professional penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I7. Nilai LPPD	Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Penguatan peran kelembagaan masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam renstra Satpol PP dan sejalan dengan RPJMD tahun 2021-2026 yaitu ***“meningkatkan kualitas pelayanan penegakan peraturan***

daerah dan peraturan kepala daerah, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka perlu dirumuskan sasaran. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran yang dirumuskan adalah **“Kondisi tenteram dan tertib”**.

Sedangkan indikator dan target kinerja Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 untuk sasaran yang ingin dicapai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kondisi Tenteram dan Tertib	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	52	55	57,5	60

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikator terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Mempedomani perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 serta Renstra Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan dalam penyusunan rumusan kebijakan perencanaan;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu strategis Satpol PP termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemic Covid-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					49.521.430.356			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		75 Point	16.332.778.925				
	Nilai IKM Perangkat Daerah		86,21					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		19 Dokumen	128.800.000				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	10 Dokumen	69.000.000	DAU			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	5 Laporan	34.500.000	DAU			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Laporan	25.300.000	DAU			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai		100 %	8.389.628.925				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	686 orang / bulan	8.389.628.925	DAU			

Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	575.000.000				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	7 paket	500.000.000	DAU			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	125 Orang	75.000.000	DAU			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum			645.150.000				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	6 paket	70.150.000	DAU			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	6 paket	160.000.000	DAU			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 paket	65.000.000	DAU			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	497 dokumen	10.000.000	DAU			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	48 laporan	75.000.000	DAU			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Seluruh Kabupaten, Seluruh Kecamatan, Seluruh Desa	98 laporan	215.000.000	DAU			

Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 dokumen	50.000.000	DAU			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	3.100.000.000				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	3 unit	900.000.000	DAU			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 unit	1.800.000.000	DAU			
Pengadaan Mebel	Jumlah paket barang mebel yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	105 unit	200.000.000	DAU			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	8 unit	200.000.000	DAU			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	2.439.200.000				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 laporan	98.400.000	DAU			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 laporan	2.340.800.000	DAU			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			1.055.000.000				

Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	22 unit	350.000.000	DAU			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	7 unit	550.000.000	DAU			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	7 unit	15.000.000	DAU			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	15 unit	15.000.000	DAU			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 unit	125.000.000	DAU			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Gangguan Trantibum serta Pelanggaran Perda dan Perkada			33.188.651.431				
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			31.402.501.431				
	Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten							
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 kasus	14.700.795.250	DAU			

Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 kasus	280.108.000	DAU			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 dokumen	48.300.000	DAU			
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 dokumen	11.819.960.800	DAU			
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1377 orang	1.940.000.000	DAU			
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan	Seluruh Kabupaetn / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.625.817.500	DAU			
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 unit	420.000.000	DAU			

Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200.000.000	DAU			
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	367.519.881	DAU			
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			1.681.900.000				
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda / Perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 laporan	625.500.000	DAU			
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kab. Tasikmalaya, Seluruh kecamatan, seluruh kelurahan	24 laporan	500.400.000	DAU			
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota yang dapat ditangani sesuai SOP	Kab. Tasikmalaya, Seluruh kecamatan, seluruh kelurahan	12 laporan	556.000.000	DAU			
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS terhadap kasus yang ditangani			104.250.000				
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 laporan	104.250.000	DAU			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahunan. Proses penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2022. Demikian, dokumen Perubahan Renja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaparna, Juli 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



DADANG TABRONI, SH.,MH

NIP. 19670503 199803 1 011